



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RENJA

RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN

2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2023



Jl. Tentara Pelajar No. 1 Pekalongan



dlhkotapekalongan@gmail.com



dlh.pekalongankota.go.id



[@dlh.kotapekalongan](https://www.instagram.com/dlh.kotapekalongan)



[@DLHKotaPkl](https://www.facebook.com/DLHKotaPkl)

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022.....	8
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup.....	8
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	16
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.....	20
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	25
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	46
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	46
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	46
	3.3. Program dan Kegiatan	47
	3.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	62
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	63
BAB V	PENUTUP	67
	LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Pemerintah Kota Pekalongan Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 S/D 2026.....	10
Tabel 2. 2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022.....	16
Tabel 2. 3	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022.....	17
Tabel 2. 4	Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kota Pekalongan.....	19
Tabel 2. 5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 DLH Kota Pekalongan.....	26
Tabel 2. 6	Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pekalongan.....	45
Tabel 3. 1	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024	47
Tabel 3. 2	Rumusan Rencana Program Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 DLH Kota Pekalongan.....	49
Tabel 3. 3	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 DLH Kota Pekalongan.....	62



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023, serta mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dengan tetap memperhatikan hasil kinerja yang dicapai sebelumnya, permasalahan yang ada dan isu strategis yang dihadapi. Program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan KepMendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Pekalongan Tahun 2024. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan secara menyeluruh, efektif dan efisien, maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, factual dan realistis. Secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target - target yang telah ditetapkan. Semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan dibidang lingkungan dapat lebih optimal;
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pembangunan dilaksanakan untuk



saling memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang lingkungan. Pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya yang masih belum mampu diselesaikan atau bahkan yang belum terlaksana pada tahun 2023 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2024;

3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik;
4. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2021 – 2026, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2021 – 2026 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 – 2026. Kedudukan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi:

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah bersama DPRD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016



Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);

1.3. Maksud dan Tujuan

Esensi dari Rencana Kerja ini bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2024 adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah:

1. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dan mensinkronkan dengan program dan kegiatan dari provinsi dan pusat.
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam rangka pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup ini adalah dipakai sebagai pedoman atau acuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dalam melakukan dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan publik;
2. Menurunkan tingkat pencemaran air;
3. Meningkatkan kualitas lahan; dan
4. Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan perkotaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang



Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Lingkungan Hidup, proses penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup, keterkaitan antara Renja Dinas Lingkungan Hidup dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Lingkungan Hidup, dengan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Renja Dinas Lingkungan Hidup serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup 2021 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026.

Bab ini memuat tentangkajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan pada waktu penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, serta ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Berisikan uraian mengenai:



1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup;
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Walikota Pekalongan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDG's (Sustainable Development Goals);
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup; dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kota Pekalongan.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan



Hidup yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup

Berisikan Program, kegiatan dan rencana pendanaan Dinas Lingkungan Hidup.

Bab V : Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.



BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian Renja tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2022 secara umum Dinas Lingkungan Hidup telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi.

Tujuan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Dinas Lingkungan Hidup disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan Kota Pekalongan. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam capaian kinerja strategis Dinas Lingkungan Hidup.

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022 memuat 10 (sepuluh) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 30.578.076.000,-. Setelah melalui beberapa tahapan proses perencanaan dan pembahasan oleh TAPD, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kota



Pekalongan tahun 2022 anggaran berubah menjadi sebesar Rp. 35.153.046.000,- dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan sama dengan penetapan APBD. Sebagai dasar penilaian kinerja capaian keuangan, keluaran dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi “Sangat Tinggi” yaitu capaian berkisar antara 91-100%, “Tinggi” yaitu capaian berkisar antara 75-90%, “Sedang” yaitu capaian berkisar antara 65-75%, “Rendah” yaitu capaian berkisar antara 50-65%, dan “Sangat Rendah” yaitu capaian di bawah 50%.

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan APBDP DLH Kota Pekalongan tahun 2022, terdapat 38 sub kegiatan dengan status capaian “Sangat Tinggi” dan 5 sub kegiatan dengan status capaian “Tinggi”, tidak ada sub kegiatan dengan status capaian “Sedang”, 1 sub kegiatan dengan status capaian “Rendah” dan 1 sub kegiatan dengan status capaian “Sangat Rendah”.

Capaian kinerja keluaran (*output*) sebagian besar kegiatan di DLH Kota Pekalongan status capaiannya kategori “sangat baik” yaitu 38 sub kegiatan dan kategori “sedang” 7 (dua) kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program (hasil/ *outcome*) yang merujuk pada Bab VIII - RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026, dari 10 indikator kinerja program terdapat 9 indikator yang telah memenuhi target kinerja dan 1 indikator yang belum memenuhi target kinerja. Indikator kinerja program yang belum memenuhi target adalah Indikator Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Faktor penyebab belum tercapainya target adalah penambahan luasan ruang terbuka hijau belum sesuai yang ditargetkan.

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD-P Tahun 2022 dan Rencana Capaian Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel. 2.1.



Tabel 2. 1
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 S/D 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2022	Realisasi 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Lingkungan Hidup										
1	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	100	20	20	60	60	80	80	Jenis dokumen NA RPPLH (2022), RPPLH (2022), KLHS RDTR (2022), D3TLH (2021), KLHS RPJMD (2023) Total target 5 dokumen
2	Persentase Limbah Yang Diolah	Persen	49,01	33,37	33,37	39,29	49,01	49,01	100	
	- Jumlah monitoring terhadap kegiatan/usaha pemanfaat air tanah yang dilaksanakan	titik				40	42			
	- Jumlah pengambilan sampel air sungai yang dilakukan	kali				30	30			
	- Jumlah sampah yang diambil dari sungai	M3				1800	1800			
	- Jumlah sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan yang diadakan	buah				10	10			
	- jumlah kampung iklim yang dibentuk	lokasi				3	3			



No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2022	Realisasi 2022			
	- Jumlah genset yang diadakan	unit				1	1			
	- Jumlah sampel yang diuji	sampel				155	213			
	- Jumlah COD reaktor yang diadakan	unit				1	1			
	- Jumlah alat destilasi yang diadakan	unit				3	3			
	- Jumlah Kegiatan Pelatihan yg dilaksanakan	kegiatan				5	6			
	- Persentase LPK yang terakreditasi	persen				100	92			
	- jumlah DIKPLHD yang disusun	dokumen				1	1			
	- jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disusun	dokumen				1	1			
	- Jumlah limbah cair yang dikelola	M3				230.000	230.000			
3	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	2,949	2,899	2,899	2,909	2,900	2,900	98,34	
	- Jumlah gergaji mesin yang diadakan	unit				5	5			
	- Jumlah lokasi konstruksi taman kota yang diadakan	lokasi				2	2			
	- Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala makam	lokasi				2	2			
	- Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala taman kota	lokasi				4	4			
	- Jumlah lokasi perapihan pohon di sempadan jalan	lokasi				4	4			
	- Jumlah taman yang difasilitasi pembangunan/pemeliharaan	lokasi				6	6			
	- jumlah TAHURA yang dipelihara	lokasi				6	6			
4	Persentase Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 Yang Diberikan	Persen	100	31,11	31,11	13,33	13,33	44,44	44,44	
	- Jumlah verifikasi lapangan ke usaha/kegiatan yang mengajukan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 maupun perpanjangan Izinnya	kegiatan/u saha				14	16			
5	Persentase Usaha/Kegiatan yang mendapatkan rekomendasi Persetujuan Teknis Lingkungan dan Persetujuan Teknis PPLH	Persen	100	16,67	16,67	16,67	20,17	36,84	36,84	



No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2022	Realisasi 2022			
	- Jumlah monitoring/pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan kepada perusahaan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan	perusahaan				50	51			
	- Jumlah perusahaan yang memiliki Izin Lingkungan yang diawasi	Perusahaan				65	73			
	- Jumlah pengawasan terpadu dengan pihak terkait dalam rangka penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	kegiatan				5	2			
6	Persentase Masyarakat/Komunitas Peduli LH Yang Mendapatkan Edukasi Lingkungan Hidup	Persen	50	50	50	50	100	100	200	
	- Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	komunitas				5	5			
	- Jumlah kelompok lembaga kemasyarakatan (PKK RT/ RW/Kelurahan/Kecamatan) yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan hidup	kelompok				2	4			
	- Jumlah pemberdayaan komunitas peduli lingkungan hidup di Kota	komunitas				5	5			
	- Jumlah Saka Kalpataru (Pramuka) yang dibina	orang				100	100			
	- Jumlah fasilitasi persiapan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Provinsi dan/atau Nasional yang diselenggarakan	Event				1	1			
	- Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan	Event				2	2			
	- Jumlah Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kota Pekalongan yang diselenggarakan	Event				1	1			
	- Jumlah lomba-lomba dalam rangka peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan	lomba				4	4			
7	Persentase Perolehan Penghargaan Bidang LH	Persen	75	75	75	75	100	100	133,33	
	- Jumlah pembinaan dan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah dan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional/Mandiri	Event				2	2			



No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2022	Realisasi 2022			
	- Jumlah pembinaan dan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Pekalongan yang diselenggarakan	Event				1	1			
	- Jumlah pembinaan dan penilaian Peringkat Kinerja (Proper) Perusahaan yang diselenggarakan	Event				1	1			
8	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup Dari Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	kasus				6	30			
9	Persentase pengelolaan sampah	persen	0,31	2,19	2,19	0,27	33,28	33,28	107,35	
	- Jumlah bulan layanan pengangkutan sampah	bulan				12	12			
	- Jumlah ruas jalan yang disapu	ruas jalan				55	55			
	- Jumlah TPS3R yang difasilitasi (SIDa)	TPS3R				20	20			
	- Jumlah bank sampah RW yang dibina	unit				20	22			
	- Jumlah lokasi pembuangan sampah liar yang dilakukan pengawasan	lokasi				30	36			
	- Jumlah perlengkapan bank sampah yang diadakan	jenis				9	10			
	- Jumlah tempat sampah yang diadakan	unit				32	30			
	- Jumlah rumah botol plastik yang diadakan	unit				8	11			
	- Jumlah bahan habis pakai yang dibeli	jenis				8	13			
	- Jumlah dumptruk yang diadakan	unit				1	1			
	- Jumlah jembatan timbang yang ditera/dikalibrasi	unit				1	1			
	- Jumlah kendaraan roda 3 yang diadakan	unit				12	12			
	- Jumlah kendaraan roda 3 yang dipelihara	unit				32	32			
	- Jumlah mesin pemilah sampah yang diadakan	unit				3	2			
	- Jumlah mesin pencacah sampah yang dipelihara	unit				21	21			
	- Jumlah perlengkapan pakaian kerja yang diadakan	jenis				2	2			
	- Jumlah songkro sampah yang diadakan	unit				22	23			
	- Jumlah TPS3R yang dipelihara dan direvitalisasi	unit				4	6			



No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2022	Realisasi 2022			
	- Jumlah excavator yang diadakan	unit				1	1			
Urusan Rutin										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun	dokumen			2	2	2			
	- Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	dokumen			2	2	2			
	- Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	bulan			12	12	12			
	- Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	dokumen			4	4	4			
	- Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	dokumen			2	2	2			
	- Jumlah dokumen SPIP (1 dokumen Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	dokumen			5	5	5			
	- Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan			12	12	12			
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan			12	12	12			
	- Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	dokumen			1	1	1			
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	kali			1	1	1			
	- Jumlah pakaian kerja lapangan/rompi yang diadakan	buah			210	161	206			
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan			12	12	12			



No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD sd tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2022	Realisasi 2022			
	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan			12	12	12			
	- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit			11	23	23			
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan			12	12	12			
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan			11	11	11			
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan			12	12	12			
	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan			12	12	12			
	- Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Orang/kali			95	113	146			
	- Jumlah IPAL Laboratorium yang dibangun	unit			0	1	1			
	- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan			12	12	12			
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan			12	12	12			
	- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan			12	12	12			
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	bulan			12	12	12			
	- Jumlah bulan pemeliharaan alat besar	bulan			12	12	12			
	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	bulan			12	12	12			
	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan			12	12	12			



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada DLH Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Strategis DLD Kota Pekalongan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Kinerja pelayanan DLH Kota Pekalongan dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya yaitu memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan RTH, serta bidang kebersihan dan pengelolaan sampah. Pada tahun 2022 sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya dengan 1 (satu) indikator;
2. Meningkatnya ruang terbuka hijau dengan 1 (satu) indikator;
3. Optimalnya cakupan layanan persampahan dengan 1 (satu) indikator;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan 1 (satu) indikator; dan
5. Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup dengan 1 (satu) indikator.

Tabel 2. 2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	$= \frac{\sum \text{Parameter yang tidak sesuai baku mutu pada 5 sungai}}{\sum \text{Parameter air pada 5 sungai (7 x 5)}} \times 100 \%$
2	Meningkatkannya Ruang Terbuka Hijau	Persentase kenaikan luasan RTH	$= \frac{\text{Luas RTH tahun N} - \text{Luas RTH tahun N-1}}{\text{Luas RTH tahun N-1}} \times 100 \%$
3	Optimalnya cakupan layanan persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	$= \frac{\sum \text{sampah terkelola tahun N} - \sum \text{sampah terkelola tahun N-1}}{\sum \text{sampah terkelola tahun N-1}} \times 100 \%$
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD Tahun N



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
5	Meningkatnya penataan dan ketaatan hukum lingkungan	Tertib hukum lingkungan	$\frac{\sum \text{usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan AMDAL/UKL/UPL}}{\sum \text{usaha dan/atau kegiatan yang memiliki AMDAL/UKL/UPL}} \times 100 \%$

Penilaian capaian kinerja utama DLH Kota Pekalongan tahun 2022 difokuskan pada 10 (sepuluh) program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
10. Program Pengelolaan Persampahan.

Tabel 2. 3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Sasaran Stratejis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	62,86%	62,86%	100,00
2	Meningkatkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase kenaikan luasan RTH	0,345%	0,388%	112,46
3	Optimalnya cakupan layanan persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	71,48%	92,72%	129,71
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	86	85,75	99,71
5	Meningkatnya penataan dan ketaatan hukum lingkungan	Tertib hukum lingkungan	25,30%	25,81%	102,02

Hasil analisis berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel diatas adalah sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target ditunjukkan pada indikator meningkatnya usaha yang terolah limbahnya dengan capaian kinerja



100,00%, indikator meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan capaian kinerja 112,46%, optimalnya cakupan layanan persampahan dengan capaian kinerja 129,71% dan meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup dengan capaian kinerja 102,02% atau dikategorikan **sangat tinggi**;

- b. Capaian kinerja yang tidak mencapai target atau dibawah 100% ada pada indikator meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan capaian kinerja 99,71% atau masuk dalam katagori **sangat tinggi**.

Selanjutnya hasil analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:



Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase tingkat pencemaran air			62,86	62,86	60,00	60,00	62,86		60,00	60,00	
2	Persentase kenaikan luasan RTH			0,345	0,344	0,343	0,341	0,388		0,343	0,341	
3	Persentase peningkatan pengelolaan sampah			71,48	71,07	70,68	70,29	92,72		70,68	70,29	
4	Nilai SAKIP OPD			86	87	88	89	85,75		88	89	
5	Tertib hukum lingkungan			25,30	34,42	43,00	51,90	25,81		43,00	51,90	



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

A. Permasalahan

Setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga keberadaan suatu organisasi. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Tidak semua industri melakukan uji laboratorium terhadap kualitas air limbah yang dihasilkan secara rutin.
2. Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang tidak mempunyai IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).
3. Sebagian besar industri kecil dan menengah membuang langsung air limbahnya ke saluran air atau sumber air.
4. Belum ditentukannya kelas air sungai.
5. Belum memiliki peralatan laboratorium yang memadai untuk uji kualitas udara.
6. Belum dilakukannya penetapan baku mutu kualitas udara emisi dan ambien.
7. Belum adanya pos pengaduan masyarakat yang mengakomodasi akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Selama ini pengaduan langsung ditujukan ke LH.
8. Masih minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
9. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
10. Belum optimalnya dukungan SDM.

B. Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup telah menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD tersebut kinerja DLH Kota Pekalongan mendukung pencapaian Misi ke 4 yaitu **“Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan”** dengan tujuan “meningkatkan kualitas lingkungan hidup”.

C. Tantangan dan Peluang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya DLH kota Pekalongan menghadapi tantangan sebagai berikut:



1. Letak geografis dan topografi yang berada di daerah pesisir.
2. Ketersediaan sumber utama air menurun dengan sangat cepat, diakibatkan kurangnya pencarian sumber air tanah yang baru untuk Kota Pekalongan.
3. Meningkatnya polusi terhadap air permukaan dan air tanah.
4. Kualitas udara terus menurun.
5. Produksi limbah padat/sampah naik secara signifikan.
6. Kurangnya SDM yang berkompeten sesuai bidang dan tanggungjawab pekerjaan, serta personil teknis yang dapat menganalisa dan membuat perencanaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
7. Masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan.
8. Rendahnya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Peluang yang dapat disiasati dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan antara lain:

1. Memperbaiki ketersediaan sistem pembuangan limbah.
2. Mengelola sumber daya air.
3. Mengurangi kepadatan lalu-lintas dan emisi kendaraan.
4. Libatkan sektor swasta dalam pengurangan efek gas rumah kaca.
5. Libatkan publik dan sektor swasta dalam pengelolaan limbah padat/sampah.
6. Membersihkan polusi dari perusahaan-perusahaan yang ada.
7. Mengurangi kadar polusi perusahaan-perusahaan.
8. Mengoptimalkan peran pihak terkait atau stakeholder.
9. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan.
10. Meningkatkan kapasitas SDM.

D. Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan dan pengidentifikasian isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah:



1. Pengendalian Pencemaran Air

Kota Pekalongan merupakan dataran rendah dengan wilayah pantai, dan merupakan pula kota perdagangan dan industri yang didominasi oleh industri produk tekstil dan batik yang cukup dikenal baik dalam lingkup nasional maupun global, disamping ada pula industri dibidang perikanan dan industri lainnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran baik air, tanah maupun udara. Berkaitan dengan permasalahan limbah industri berbagai upaya perbaikan telah dilakukan baik melalui sosialisasi masyarakat terutama kalangan industri dan UKM, fasilitasi pembangunan IPAL skala kecil ataupun IPAL bersama, namun belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, mengingat sumber pencemar tidak hanya berasal dari wilayah Kota Pekalongan saja, mengingat Kota Pekalongan merupakan wilayah hilir maka sumber pencemarannya pun berasal dari daerah di luar Kota Pekalongan, yang juga banyak menghasilkan limbah industri.

2. Pengendalian Pencemaran Udara

Kota Pekalongan merupakan daerah yang berada disisi sebelah utara Pulau Jawa yang dilalui oleh jalur transportasi utama di Pulau Jawa. Jumlah kendaraan berat yang melintasi Kota Pekalongan sangat banyak yang berdampak pada tingginya jumlah emisi gas buang di Kota Pekalongan yang menyebabkan pencemaran udara. Selain berasal dari sumber emisi bergerak, pencemaran udara berasal dari emisi tidak bergerak, yaitu industri yang menggunakan bahan bakar batu bara, bensin maupun solar dan sejenisnya yang menghasilkan gas buang melalui cerobong yang menyebabkan pencemaran udara sehingga kualitas udara menurun. Permasalahan pencemaran udara juga muncul, sehingga kualitas udarapun semakin menurun akibat semakin banyak dihasilkannya emisi gas buang baik dari transportasi ataupun asap industri.

3. Pengelolaan Sampah/Limbah Padat

Isu persampahan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus, karena pada dasarnya setiap hari semua orang menghasilkan sampah, sehingga volume sampah semakin lama akan semakin bertambah. Dalam jangka panjang apabila tidak dilakukan pengelolaan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang diharuskan akan menjadi permasalahan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan, apabila untuk kawasan perkotaan dengan luas lahan yang relatif terbatas, sebagaimana telah terjadi di berbagai daerah. Untuk itu isu/permasalahan persampahan di masyarakat ini perlu mendapatkan perhatian dan penerapan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan sehingga secara bertahap volume sampah dapat dikurangi dan tidak terus meningkat.



TPA Degayu yang saat ini menjadi satu satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Pekalongan masih menggunakan open dumping, disamping itu tumpukan sampah di TPA Degayu volumenya semakin banyak sehingga sudah mendekati kapasitas maksimal, sedangkan untuk penambahan lahan TPA sudah tidak memungkinkan karena daerah tersebut peruntukannya bukan untuk TPA.

4. Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Pemanasan Global (Global Warming)

Isu pemanasan global yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan dan ekosistem bumi akibat efek gas rumah kaca, rusaknya lapisan ozon akibat banyaknya emisi gas buang yang dihasilkan kegiatan manusia dampaknya akan sangat mengerikan, secara makro yang dapat memacu terjadinya perubahan iklim, mencairnya es di kutub utara dan selatan, serta kerusakan bumi lainnya. Untuk itu isu pemanasan global ini harus menjadi perhatian semua kalangan serta perlu dilakukannya tindakan-tindakan pencegahan, pemulihan kondisi lingkungan guna meminimalisir terjadinya dampak pemanasan global tersebut.

5. Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau dan Perubahan Penggunaan Lahan.

Ruang terbuka hijau memiliki peranan yang cukup penting untuk mengurangi pencemaran udara di Kota Pekalongan, sekaligus meningkatkan kesejukan dan kerapian kota. Sebagaimana kita ketahui, keberadaan ruang terbuka hijau kota telah menjadi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu besar ruang terbuka hijau tersebut minimal 30% dari luas kota. Sementara ini luas ruang terbuka hijau di Kota Pekalongan adalah sebesar 108,53 ha. Perbandingan luas ruang terbuka hijau dibanding luas wilayah Kota Pekalongan adalah $108,53 \text{ ha} : 3.742 \text{ ha}$ (luas wilayah Kota Pekalongan dikurangi sawah, tambak dan badan air) atau sebesar 2,900%. Persentase tersebut masih jauh dari luas RTH yang dipersyaratkan dalam UU No. 26 Tahun 2007. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan harus berupaya untuk menambah luasan RTH yang ada. Terutamanya penambahan ruang-ruang hijau untuk publik yang dirasa masih kurang seperti taman kota, taman lingkungan baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW dan sebagainya.

Perubahan penggunaan lahan juga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena berubahnya fungsi lahan, misalnya dari semula lahan pertanian menjadi lahan perumahan atau lahan industri, sehingga mengakibatkan kurangnya daerah resapan air yang dampaknya ketika hujan terjadi banjir.

6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan.

Kita ketahui bersama bahwa saat ini, tingkat kesadaran masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan masih sangat rendah. Hal ini



ditunjukkan dengan perilaku dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan, sebagai contoh membuang sampah/limbah sembarangan, melakukan penebangan tanaman/hutan tanpa berusaha melakukan penanaman kembali, kurang perhatian terhadap gerakan penghijauan, kurang menyadari bahwa bumi ini nantinya perlu dijaga dan dilestarikan untuk kepentingan generasi selanjutnya. Kurangnya kesadaran masyarakat tersebut salah satu sebabnya antara lain belum tersosialisasikannya secara optimal peraturan-peraturan tentang lingkungan hidup serta masih lemahnya penegakan peraturan tentang lingkungan hidup.

7. Adaptasi dan Mitigasi Rob.

Rob merupakan permasalahan yang sangat sulit diatasi, disamping disebabkan oleh penurunan permukaan tanah juga disebabkan oleh meningkatnya permukaan air laut yang disebabkan oleh *Global Warming (Pemanasan Global)*.

Penurunan permukaan tanah salah satunya disebabkan oleh banyaknya pengambilan air bawah tanah untuk kebutuhan hidup dan untuk industri yang tidak terkontrol. *Global Warming (Pemanasan Global)* merupakan fenomena alam yang terjadi secara global di berbagai belahan dunia. Hal ini disebabkan karena tingginya Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari pembakaran fosil.

Kawasan yang terkena dampak rob saat ini semakin meluas, hal ini menyebabkan kerentanan masyarakat terhadap penyakit semakin tinggi. Semua kelurahan yang berada di daerah pesisir Kota Pekalongan diantaranya Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Degayu, Panjang Wetan, Pasirkratonkramat, Krapyak, Klego dan Pabean terkena dampak rob.

8. Kerusakan biomasa

Tingginya jumlah pupuk kimia yang digunakan untuk pertanian saat ini menjadi kendala di semua daerah termasuk Kota Pekalongan. Pupuk kimia yang digunakan secara terus menerus akan menghasilkan panen yang maksimal akan tetapi lama kelamaan akan menyebabkan ketergantungan terhadap pupuk kimia yang menyebabkan tanah tersebut akan mengalami kerusakan. Selain dari pupuk kimia, kerusakan biomasa juga diakibatkan oleh tingginya pencemaran air industri sehingga biomasa menjadi kurang berfungsi dengan maksimal.

9. Konservasi Sumber Daya Air (SDA)

Kota Pekalongan merupakan kota jasa yang memiliki banyak sekali industri kecil yang berpotensi mencemari lingkungan. Dampaknya adalah berkurangnya ketersediaan air bersih dari sumur dangkal di wilayah tersebut. Daerah pantai sumur dangkal sudah tercemar karena adanya intrusi air laut sehingga rasa air sumur menjadi asin. Salah satu upaya



untuk mendapatkan air bersih tersebut adalah dengan membuat sumur dalam / sumur artesis atau dengan mengambil air dari Kabupaten Batang maupun Kabupaten Pekalongan. Perlu adanya konservasi sumber daya air agar jumlah air bersih di Kota Pekalongan terjaga.

10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan.

Kota Pekalongan memiliki daerah yang wilayahnya secara ekonomis sangat menguntungkan, tetapi dilihat dari dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat merugikan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya sarana dan prasarana pendukung agar dampak lingkungan yang ditimbulkan dapat tertangani dengan baik. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan diantaranya adalah sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air, udara, persampahan, limbah B3, rob dan lain lain.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Renja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Disamping itu dokumen Renja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup.

Dengan disusunnya Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan tahun 2024, telah dirumuskan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dengan membandingkan rumusan rancangan awal RKPD dengan ketersediaan anggaran serta kebutuhan OPD, terdapat perbedaan yang menyebabkan perubahan perumusan kebutuhan tersebut. Perubahan rumusan kebutuhan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Perubahan tersebut antara lain anggaran pagu kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:



Tabel 2. 5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 DLH Kota Pekalongan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	12.859.982.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	14.854.719.000	
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	23.032.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	15.960.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	2 dokumen	2.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	2 dokumen	2.320.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusu	2 dokumen	1.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusu	2 dokumen	1.640.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	- Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah - Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun - Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) - Jumlah dokumen SPIP (1 dok RTP dan 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	12 bulan 4 dokumen 2 dokumen 5 dokumen	18.632.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	- Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah - Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun - Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) - Jumlah dokumen SPIP (1 dok RTP dan 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	12 bulan 4 dokumen 2 dokumen 5 dokumen	12.000.000	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	9.830.664.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	10.716.917.000	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	9.830.664.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	10.606.397.000	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	106.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	109.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1.520.000	
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatu	100 persen	28.506.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatu	100 persen	16.880.000	
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah keikutsertaan dalam even tingkat kota Jumlah pakaian dinas yang diadakan	2 kali 210 buah	28.506.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah keikutsertaan dalam even tingkat kota Jumlah pakaian dinas yang diadakan	2 kali 210 buah	16.880.000	
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	250.761.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	327.105.000	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	5.700.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	4.275.000	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah peralatan dan	12 bulan	57.900.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah peralatan dan	12 bulan	53.380.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 unit				perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 unit		
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	8.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	750.000	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	82.300.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	131.700.000	
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	24.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	24.500.000	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan	12 bulan	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan	12 bulan	2.500.000	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	95 kali	69.861.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	95 kali	110.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	536.288.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	553.993.000	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.400.000	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	263.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	267.960.000	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	270.888.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	283.633.000	
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.190.731.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.223.864.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	22 unit	162.982.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	22 unit	208.787.000	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Pekalongan	Jumlah alat besar yang terpelihara secara rutin/berkala	38 unit	1.897.449.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Pekalongan	Jumlah alat besar yang terpelihara secara rutin/berkala	38 unit	2.885.077.000	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1 unit	105.300.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1 unit	105.000.000	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	25.000.000	
B	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Pekalongan	Persentase limbah yang diolah	45,02 persen	4.442.547.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Pekalongan	Persentase limbah yang diolah	45,02 persen	1.660.793.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	51,09 persen	920.999.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	51,09 persen	852.526.000	
22	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah monitoring terhadap kegiatan/usaha pemanfaat air tanah yang dilaksanakan - jumlah pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang disosialisasi - jumlah pemantauan kualitas udara emisi/ambien yang dilaksanakan - jumlah pengambilan sampel air sungai yang dilakukan - jumlah sampah yang diambil dari sungai 	50 titik 100 usaha/ kegiatan 2 kali 90 kali 5500 m3	552.299.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah monitoring terhadap kegiatan/usaha pemanfaat air tanah yang dilaksanakan - jumlah pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang disosialisasi - jumlah pemantauan kualitas udara emisi/ambien yang dilaksanakan - jumlah pengambilan sampel air sungai yang dilakukan - jumlah sampah yang diambil dari sungai 	50 titik 100 usaha/ kegiatan 2 kali 90 kali 5500 m3	542.730.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Pekalongan	jumlah kampung iklim yang dibentuk	4 lokasi	25.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Pekalongan	jumlah kampung iklim yang dibentuk	4 lokasi	18.750.000	
24	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	- jumlah pengadaan alat laboratorium - jumlah sampel yang diuji - jumlah uji profesiensi/uji banding - persentase parameter yang diakreditasi	2 unit 180 sampel 1 hasil uji 0 persen	343.700.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	- jumlah pengadaan alat laboratorium - jumlah sampel yang diuji - jumlah uji profesiensi/uji banding - persentase parameter yang diakreditasi	2 unit 180 sampel 1 hasil uji 0 persen	291.046.000	
b	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	76.47 persen	3.521.548.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	76.47 persen	808.267.000	
25	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Pekalongan	- jumlah DIKPLHD yang disusun - jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disusun	1 dokumen 1 dokumen	66.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Pekalongan	- jumlah DIKPLHD yang disusun - jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disusun	1 dokumen 1 dokumen	89.368.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	- jumlah IPAL komunal yang dibangun - jumlah limbah cair yang dikelola	1 unit 250.000 m3	3.455.548.000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	- jumlah IPAL komunal yang dibangun - jumlah limbah cair yang dikelola	1 unit 250.000 m3	718.899.000	
C	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kota Pekalongan	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,949 persen	3.933.751.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kota Pekalongan	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,949 persen	4.509.357.000	
a	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Luas RTH Publik	109,607 Ha	3.933.751.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Luas RTH Publik	109,607 Ha	4.509.357.000	
28	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Pekalongan	- jumlah lokasi pemeliharaan pohon di sempadan jalan - jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala makam - jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala taman kota - jumlah pengadaan konstruksi taman kota - persentase peningkatan luasan RTH di PIM	4 wilayah 2 lokasi 4 lokasi 8 lokasi 0,001 persen	3.683.751.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Pekalongan	- jumlah lokasi pemeliharaan pohon di sempadan jalan - jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala makam - jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala taman kota - jumlah pengadaan konstruksi taman kota - persentase peningkatan luasan RTH di PIM	4 wilayah 2 lokasi 4 lokasi 8 lokasi 0,001 persen	3.639.497.000	
29	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kota Pekalongan	jumlah TAHURA yang dipelihara	7 lokasi	250.000.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kota Pekalongan	jumlah TAHURA yang dipelihara	7 lokasi	869.860.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kota Pekalongan	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	2.271.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kota Pekalongan	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	2.271.000	
a	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Pekalongan	Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3	6 persen	2.271.000	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Pekalongan	Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3	6 persen	2.271.000	
30	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Pekalongan	Jumlah verifikasi lapangan ke usaha/kegiatan yang mengajukan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 maupun perpanjangan Izinnya	10 kegiatan/ usaha	2.271.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Pekalongan	Jumlah verifikasi lapangan ke usaha/kegiatan yang mengajukan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 maupun perpanjangan Izinnya	10 kegiatan/ usaha	2.271.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kota Pekalongan	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	66.461.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kota Pekalongan	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	40.500.000	
a	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan	10 kegiatan	66.461.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan	10 kegiatan	40.500.000	
31	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Pekalongan	Jumlah monitoring/pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan kepada perusahaan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan	30 Perusahaan	23.311.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Pekalongan	Jumlah monitoring/pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan kepada perusahaan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan	30 Perusahaan	14.250.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah perusahaan yang memiliki Izin Lingkungan yang diawasi	38 Perusahaan	38.150.000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah perusahaan yang memiliki Izin Lingkungan yang diawasi	38 Perusahaan	26.250.000	
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kota Pekalongan	Jumlah pengawasan terpadu dengan pihak terkait dalam rangka penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	5 Kegiatan	5.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kota Pekalongan	Jumlah pengawasan terpadu dengan pihak terkait dalam rangka penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	5 Kegiatan	-	
F	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Pekalongan	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen	404.307.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Pekalongan	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen	283.393.000	
a	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	5 komunitas	404.307.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	5 komunitas	283.393.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Pekalongan	- Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan komunitas peduli lingkungan hidup di Kota Pekalongan - Jumlah kelompok lembaga kemasyarakatan (PKK RT/ RW/Kelurahan/Kecamatan) yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan hidup	10 Kegiatan 2 Kelompok	100.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Pekalongan	- Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan komunitas peduli lingkungan hidup di Kota Pekalongan - Jumlah kelompok lembaga kemasyarakatan (PKK RT/ RW/Kelurahan/Kecamatan) yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan hidup	10 Kegiatan 2 Kelompok	72.000.000	
35	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah Saka Kalpataru (Pramuka) yang dibina	80 Orang	70.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah Saka Kalpataru (Pramuka) yang dibina	80 Orang	52.500.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah fasilitasi persiapan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Provinsi dan/atau Nasional yang diselenggarakan Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan Jumlah Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kota Pekalongan yang diselenggarakan Jumlah lomba-lomba dalam rangka peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan	1 Event 2 Event 1 Event 4 Lomba	234.307.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah fasilitasi persiapan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Provinsi dan/atau Nasional yang diselenggarakan Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan Jumlah Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kota Pekalongan yang diselenggarakan Jumlah lomba-lomba dalam rangka peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan	1 Event 2 Event 1 Event 4 Lomba	158.893.000	
G	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Pekalongan	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75 persen	113.570.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Pekalongan	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75 persen	63.750.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	3 penghargaan	113.570.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	3 penghargaan	63.750.000	
37	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	- Jumlah pembinaan dan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah dan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional/Mandiri - Jumlah pembinaan dan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Pekalongan yang diselenggarakan - Jumlah pembinaan dan penilaian Peringkat Kinerja (Proper) Perusahaan yang diselenggarakan	2 Event 1 Event 1 Event	113.570.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	- Jumlah pembinaan dan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah dan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional/Mandiri - Jumlah pembinaan dan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Pekalongan yang diselenggarakan - Jumlah pembinaan dan penilaian Peringkat Kinerja (Proper) Perusahaan yang diselenggarakan	2 Event 1 Event 1 Event	63.750.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Pekalongan	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	18.171.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Pekalongan	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	14.625.000	
a	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	6 kasus	18.171.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	6 kasus	14.625.000	
38	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	6 Kasus	18.171.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	18 pengaduan	12.750.000	
39						Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Pekalongan	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penganggunjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kab/kota	1 perkara	1.875.000	
I	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kota Pekalongan	Persentase pengelolaan sampah	0,29 persen	10.537.833.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kota Pekalongan	Persentase pengelolaan sampah	0,29 persen	10.555.706.000	



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	Pengelolaan Sampah	Kota Pekalongan	Persentase pengurangan sampah	17,46 persen	10.537.833.000	Pengelolaan Sampah	Kota Pekalongan	Persentase pengurangan sampah	17,46 persen	10.555.706.000	
40	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	- Jumlah bulan layanan pengangkutan sampah - Jumlah ruas jalan yang disapu - Jumlah TPS3R yang difasilitasi - Jumlah TPS3R yang operasional	12 bulan 55 ruas jalan 21 TPS3R 21 unit	6.289.342.000	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	- Jumlah bulan layanan pengangkutan sampah - Jumlah ruas jalan yang disapu - Jumlah TPS3R yang difasilitasi - Jumlah TPS3R yang operasional	12 bulan 55 ruas jalan 21 TPS3R 21 unit	7.531.745.000	
40	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Pekalongan	- Jumlah bank sampah RW yang dibina - Jumlah lokasi pembuangan sampah liar yang diawasi - Jumlah perlengkapan bank sampah yang dibeli	24 unit 25 lokasi 7 jenis 50 unit	418.491.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Pekalongan	- Jumlah bank sampah RW yang dibina - Jumlah lokasi pembuangan sampah liar yang diawasi - Jumlah perlengkapan bank sampah yang dibeli	24 unit 25 lokasi 7 jenis 50 unit	551.645.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah bahan habis pakai yang dibeli - Jumlah dumptruk yang dibeli - Jumlah kendaraan roda 3 yang dibeli - Jumlah container yang dibeli - Jumlah perlengkapan pakaian kerja yang dibeli - Jumlah TPS3R yang direvitalisasi - Jumlah TPS yang dipelihara 	14 jenis 1 unit 7 unit 5 unit 4 jenis 3 unit 2 unit	3.830.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah bahan habis pakai yang dibeli - Jumlah dumptruk yang dibeli - Jumlah kendaraan roda 3 yang dibeli - Jumlah container yang dibeli - Jumlah perlengkapan pakaian kerja yang dibeli - Jumlah TPS3R yang direvitalisasi - Jumlah TPS yang dipelihara 	14 jenis 1 unit 7 unit 5 unit 4 jenis 3 unit 2 unit	2.472.316.000	
JUMLAH					32.378.893.000	JUMLAH					31.985.114.000



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Perkembangan perencanaan partisipatif bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Semua pihak yang terkait selanjutnya dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (stakeholders). Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program, dan diyakini bahwa besarnya komitmen ini tergantung kepada sejauhmana mereka terlibat dalam proses perencanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di mana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain.

Demi mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026, yakni Terwujudnya Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri, dan Religius. Pemerintah Kota Pekalongan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan (RPJMD) Tahun 2021-2026. Proses pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Pekalongan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Musrenbang Kelurahan, kemudian dilanjutkan dalam forum Musrenbang Kecamatan, tahapan dilaksanakan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD. Kemudian dilaksanakan Musrenbang RKPD yang menghasilkan rancangan akhir RKPD untuk dikaji bersama kelayakannya untuk proses penetapan. Didalam Musrenbang RKPD Tahun 2022 terdapat beberapa usulan dari kelompok masyarakat yang terkait dengan tupoksi DLH Kota Pekalongan, usulan tersebut diantaranya sebagai berikut:



Tabel 2. 6
Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Pekalongan

Dinas Lingkungan Hidup

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Sampah				
1.1	Kegiatan Pengelolaan Sampah				
11.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Pekalongan Selatan	Pengadaan Kendaraan Roda Tiga	6 unit	



BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2021-2024 mengambil tema **“Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Tujuh Prioritas Nasional dalam RKP 2021 yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. “Tujuh Prioritas Nasional ini didukung oleh Kementerian/Lembaga melalui penetapan Program, Kegiatan dan Proyek Prioritas, serta didukung oleh Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah menurut pembagian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan”.

Pada tahun 2024 Kementerian LHK menekankan tindak lanjut dan arah pembangunan LHK sekaligus mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, serta (c) Pembangunan Rendah Karbon.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran tujuan Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH Kota Pekalongan serta identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai sesuai tujuan organisasi. Adapun tujuan dan sasaran DLH Kota Pekalongan, telah dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
 1. Menurunnya Tingkat Pencemaran Air;
 2. Meningkatkan Kualitas Lahan;
 3. Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan.



b. Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup;
3. Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya;
4. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau;
5. Optimalnya cakupan layanan persampahan.

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran DLH Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2022 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing seksi selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	88
		Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup	Tertib Hukum Lingkungan	43,00 %
2	Menurunnya Tingkat Pencemaran Air	Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	60,00 %
3	Meningkatkan Kualitas Lahan	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase kenaikan luasan RTH	0,343 %
4	Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	Optimalnya cakupan layanan persampahan	Persentase pelayanan persampahan	70,68 %

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan



program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Rencana kerja tahun 2024 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarnya. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2024. Pada prinsipnya program dan kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan. Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 9 Program, 16 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 31.985.114.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kota Pekalongan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:



Tabel 3. 2
Rumusan Rencana Program Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 DLH Kota Pekalongan

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				31.985.114.000				34.308.699.000
2.11	LINGKUNGAN HIDUP				31.985.114.000				34.308.699.000
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Kota Pekalongan	100%	14.854.719.000	APBD		100%	15.583.905.000
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pekalongan	100%	15.960.000	APBD		100%	29.874.000
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	Kota Pekalongan	2 dokumen	2.320.000	APBD		2 dokumen	10.750.000
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusu	Kota Pekalongan	2 dokumen	1.640.000	APBD		2 dokumen	1.650.000



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah - Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun - Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) - Jumlah dokumen SPIP (1 dok RTP dan 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	Kota Pekalongan	12 bulan 4 dokumen 2 dokumen 5 dokumen	12.000.000	APBD		12 bulan 4 dokumen 2 dokumen 5 dokumen	17.474.000
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	10.716.917.000	APBD		100 persen	12.581.275.000
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kota Pekalongan	12 bulan	10.606.397.000	APBD		12 bulan	12.473.625.000
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Pekalongan	12 bulan	109.000.000	APBD		12 bulan	106.000.000
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Kota Pekalongan	1 dokumen	1.520.000	APBD		1 dokumen	1.650.000
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatu	Kota Pekalongan	100 persen	16.880.000	APBD		100 persen	28.105.000



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny	Jumlah keikutsertaan dalam even tingka kota Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kota Pekalongan	2 kali 210 buah	16.880.000	APBD		2 kali 210 buah	28.105.000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 Persen	327.105.000	APBD		100 Persen	247.235.000
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Pekalongan	12 bulan	4.275.000	APBD		12 bulan	5.700.000
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kota Pekalongan	12 bulan 6 unit	53.380.000	APBD		12 bulan 6 unit	57.900.000
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Pekalongan	12 bulan	750.000	APBD		12 bulan	8.000.000
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Kota Pekalongan	11 bulan	131.700.000	APBD		11 bulan	82.300.000
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Pekalongan	12 bulan	24.500.000	APBD		12 bulan	24.500.000
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan	Kota Pekalongan	12 bulan	2.500.000	APBD		12 bulan	2.500.000



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Kota Pekalongan	95 kali	110.000.000	APBD		95 kali	66.335.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	100 Persen	553.993.000	APBD		100 Persen	537.479.000
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Pekalongan	12 bulan	2.400.000	APBD		12 bulan	2.400.000
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Pekalongan	12 bulan	267.960.000	APBD		12 bulan	263.000.000
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	Kota Pekalongan	12 bulan	283.633.000	APBD		12 bulan	272.079.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	100 Persen	3.223.864.000	APBD		100 Persen	2.159.937.000
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Kota Pekalongan	22 unit	208.787.000	APBD		22 unit	162.982.000



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang terpelihara secara rutin/berkala	Kota Pekalongan	38 unit	2.885.077.000	APBD		38 unit	1.866.655.000
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Kota Pekalongan	1 unit	105.000.000	APBD		1 unit	105.300.000
2.11.01.2.09.0010,	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kota Pekalongan	12 bulan	25.000.000	APBD		12 bulan	25.000.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase limbah yang diolah	Kota Pekalongan	45,02 persen	1.660.793.000	APBD		45,02 persen	1.419.546.000
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	Kota Pekalongan	51,09 persen	852.526.000	APBD		51,09 persen	979.717.000



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	- jumlah monitoring terhadap kegiatan/usaha pemanfaat air tanah yang dilaksanakan - jumlah pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang disosialisasi - jumlah pemantauan kualitas udara emisi/ambien yang dilaksanakan - jumlah pengambilan sampel air sungai yang dilakukan - jumlah sampah yang diambil dari sungai	Kota Pekalongan	50 titik 100 usaha/ kegiatan 2 kali 90 kali 5500 m3	542.730.000	APBD		50 titik 100 usaha/ kegiatan 2 kali 90 kali 5500 m3	541.017.000
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	jumlah kampung iklim yang dibentuk	Kota Pekalongan	4 lokasi	18.750.000	APBD		4 lokasi	25.000.000
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	- jumlah pengadaan alat laboratorium - jumlah sampel yang diuji - jumlah uji profesiensi/uji banding - persentase parameter yang diakreditasi	Kota Pekalongan	2 unit 180 sampel 1 hasil uji 0 persen	291.046.000	APBD		2 unit 180 sampel 1 hasil uji 0 persen	413.700.000
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	Kota Pekalongan	76.47 persen	808.267.000	APBD		76.47 persen	439.829.000



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	- jumlah DIKPLHD yang disusun - jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disusun	Kota Pekalongan	1 dokumen 1 dokumen	89.368.000	APBD		1 dokumen 1 dokumen	66.000.000
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- jumlah IPAL komunal yang dibangun - jumlah limbah cair yang dikelola	Kota Pekalongan	1 unit 250.000 m3	718.899.000	APBD		1 unit 250.000 m3	373.829.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Kota Pekalongan	2,949 persen	4.509.357.000	APBD		2,949 persen	4.402.381.000
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik	Kota Pekalongan	109,607 Ha	4.509.357.000	APBD		109,607 Ha	4.402.381.000
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	- jumlah lokasi pemeliharaan pohon di sempadan jalan - jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala makam - jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala taman kota - jumlah pengadaan konstruksi taman kota - persentase peningkatan luasan RTH di PIM	Kota Pekalongan	4 wilayah 2 lokasi 4 lokasi 8 lokasi 0,001 persen	3.639.497.000	APBD		4 wilayah 2 lokasi 4 lokasi 8 lokasi 0,001 persen	3.731.936.000
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	jumlah TAHURA yang dipelihara	Kota Pekalongan	7 lokasi	869.860.000	APBD		7 lokasi	670.445.000



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	Kota Pekalongan	13,33 persen	2.271.000	APBD		13,33 persen	2.239.000
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Kota Pekalongan	6 persen	2.271.000	APBD		6 persen	2.239.000
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah verifikasi lapangan ke usaha/kegiatan yang mengajukan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 maupun perpanjangan Izinnya	Kota Pekalongan	10 kegiatan/ usaha	2.271.000	APBD		10 kegiatan/ usaha	2.239.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	Kota Pekalongan	16,67 persen	40.500.000	APBD		16,67 persen	68.150.000



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan	Kota Pekalongan	10 kegiatan	40.500.000	APBD		10 kegiatan	68.150.000
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah monitoring/pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan kepada perusahaan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan	Kota Pekalongan	30 Perusahaan	14.250.000	APBD		30 Perusahaan	30.000.000
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang memiliki Izin Lingkungan yang diawasi	Kota Pekalongan	38 Perusahaan	26.250.000	APBD		38 Perusahaan	38.150.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	50,00 persen	283.393.000	APBD		50,00 persen	455.000.000



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	5 komunitas	283.393.000	APBD		5 komunitas	455.000.000
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan komunitas peduli lingkungan hidup di Kota Pekalongan - Jumlah kelompok lembaga kemasyarakatan (PKK RT/ RW/Kelurahan/Kecamatan) yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan hidup	Kota Pekalongan	10 Kegiatan 2 Kelompok	72.000.000	APBD		10 Kegiatan 2 Kelompok	100.000.000
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Saka Kalpataru (Pramuka) yang dibina	Kota Pekalongan	80 Orang	52.500.000	APBD		80 Orang	80.000.000
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah fasilitasi persiapan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Provinsi dan/atau Nasional yang diselenggarakan Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan Jumlah Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kota Pekalongan yang	Kota Pekalongan	1 Event 2 Event 1 Event 4 Lomba	158.893.000	APBD		1 Event 2 Event 1 Event 4 Lomba	275.000.000



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
		diselenggarakan Jumlah lomba-lomba dalam rangka peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan							
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	Kota Pekalongan	75 persen	63.750.000	APBD		75 persen	95.000.000
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	Kota Pekalongan	3 penghargaan	63.750.000	APBD		3 penghargaan	95.000.000
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Jumlah pembinaan dan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah dan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional/Mandiri - Jumlah pembinaan dan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Pekalongan yang diselenggarakan - Jumlah pembinaan dan penilaian Peringkat Kinerja (Proper) Perusahaan yang diselenggarakan	Kota Pekalongan	2 Event 1 Event 1 Event	63.750.000	APBD		2 Event 1 Event 1 Event	95.000.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	Kota Pekalongan	100 persen	14.625.000	APBD		100 persen	25.000.000



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	Kota Pekalongan	6 kasus	14.625.000	APBD		6 kasus	25.000.000
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	Kota Pekalongan	18 pengaduan	12.750.000	APBD		18 pengaduan	20.000.000
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penganggunjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kab/kota	Kota Pekalongan	1 perkara	1.875.000	APBD		1 perkara	5.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	Kota Pekalongan	0,29 persen	10.555.706.000	APBD		0,29 persen	12.257.478.000
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	Kota Pekalongan	17,46 persen	10.555.706.000	APBD		17,46 persen	12.257.478.000
2.11.11.2.01.0020	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	- Jumlah bulan layanan pengangkutan sampah - Jumlah ruas jalan yang disapu - Jumlah TPS3R yang difasilitasi - Jumlah TPS3R yang operasional	Kota Pekalongan	12 bulan 55 ruas jalan 21 TPS3R 21 unit	7.531.745.000	APBD		12 bulan 55 ruas jalan 21 TPS3R 21 unit	7.550.000.000



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	- Jumlah bank sampah RW yang dibina - Jumlah lokasi pembuangan sampah liar yang diawasi - Jumlah perlengkapan bank sampah yang dibeli	Kota Pekalongan	24 unit 25 lokasi 7 jenis 50 unit	551.645.000	APBD		24 unit 25 lokasi 7 jenis 50 unit	422.478.000
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	- Jumlah bahan habis pakai yang dibeli - Jumlah dumptruk yang dibeli - Jumlah kendaraan roda 3 yang dibeli - Jumlah container yang dibeli - Jumlah perlengkapan pakaian kerja yang dibeli - Jumlah TPS3R yang direvitalisasi - Jumlah TPS yang dipelihara	Kota Pekalongan	14 jenis 1 unit 7 unit 5 unit 4 jenis 3 unit 2 unit	2.472.316.000	APBD		14 jenis 1 unit 7 unit 5 unit 4 jenis 3 unit 2 unit	4.285.000.000



3.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan program dan kegiatan juga menampung aspirasi masyarakat dari pemangku kepentingan, baik dari OPD terkait, kelompok masyarakat langsung maupun dari para relawan peduli lingkungan Kota Pekalongan yang langsung ditujukan kepada Perangkat daerah dan juga hasil tinjauan kelapangan.

Berdasarkan hasil rumusan dari pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan isu-isu strategis perangkat daerah.

Pada Musrenbang Kota tahun 2024, usulan dari pemangku kepentingan, baik dari SKPD terkait, kelompok masyarakat langsung maupun dari para relawan peduli lingkungan Kota Pekalongan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup disajikan dalam tabel 2.6 dibawah.

Tabel 3. 3
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 DLH Kota Pekalongan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan kendaraan rida tiga	Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan roda tiga yang diadakan	6 unit	Masuk dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

Perumusan rencana program dan kegiatan DLH Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD. Program, kegiatan dan sub kegiatan DLH Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Pekalongan adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Rp. 2.320.000,-;
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Rp. 1.640.000,-;
 - 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Rp. 12.000.000,-.
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Rp 10.606.397.000,-;
 - 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Rp. 109.000.000,-;
 - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Rp. 1.520.000,-.
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Rp. 16.880.000,-.
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Rp. 4.275.000,-;
 - 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Rp. 53.380.000,-;
 - 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Rp. 750.000,-;
 - 1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Rp. 131.700.000,-;
 - 1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Rp. 24.500.000,-;
 - 1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Rp. 2.500.000,-;



- 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Rp. 110.000.000,-
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Rp. 2.400.000,-;
 - 1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Rp. 267.960.000,-;
 - 1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Rp. 283.633.000,-.
- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Rp. 208.787.000,-;
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar, Rp. 2.885.077.000,-;
 - 1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Rp. 105.000.000,-;
 - 1.6.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Rp. 25.000.000,-.
- 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 2.1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - 2.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, Rp. 542.730.000,-;
 - 2.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Rp. 18.750.000.-;
 - 2.1.3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Rp. 291.046.000,-.
 - 2.2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - 2.2.1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat, Rp. 89.368.000,-;
 - 2.2.2 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Rp. 718.899.000,-.
- 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
 - 3.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota,
 - 3.1.1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Rp. 3.639.497.000,-;
 - 3.1.2 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya, Rp. 869.860.000,-
- 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - 4.1 Penyimpanan Sementara Limbah B3;



- 4.1.1 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3, Rp. 2.271.000,-.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - 5.1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, Rp. 14.250.000,-;
 - 5.1.2 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Rp. 26.250.000,-.
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - 6.1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6.1.1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan, Rp. 72.000.000,-;
 - 6.1.2 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, Rp. 52.500.000,-;
 - 6.1.3 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup, Rp. 153.893.000,-.
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - 7.1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7.1.1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rp. 63.750.000,-.
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - 8.1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota;
 - 8.1.1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota, Rp 12.750.000,-;
 - 8.1.2 Penerapan Sanksi Administratif yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, Rp. 1.875.000,-.
9. Program Pengelolaan Persampahan.
 - 9.1 Pengelolaan Sampah
 - 9.1.1 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Rp. 7.531.745.000,-
 - 9.1.2 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, Rp. 551.645.000,-;



9.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, Rp. 2.472.316.000,-.

Indikator kinerja dari program-program tersebut menjadi tanggung jawab DLH Kota Pekalongan dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Renja DLH Kota Pekalongan Tahun 2024 terdapat 9 Program, 16 Sub Kegiatan dan 41 kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Total anggaran Renja 2024 sebesar Rp. 31.985.114.000,-. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan DLH Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) DLH Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur DLH dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan DLH Kota Pekalongan pada Tahun 2024. Renja ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh bidang-bidang dan sekretariat DLH Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan pencapaian tujuan sesuai dengan tujuan DLH Kota Pekalongan. Dalam penyusunan Renja Tahun 2024 DLH Kota Pekalongan dilakukan melalui beberapa tahapan seiring dengan agenda penyusunan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dengan Renja DLH Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pendukung dan bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Kota Pekalongan 2021-2026.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja DLH Kota Pekalongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DLH. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf DLH Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh DLH sebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Semoga Renja Lingkungan Hidup Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pekalongan, 9 Agustus 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN

JOKO PURNOMO, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19671109 199603 1 002